

## Peran Pemerintah Desa Untuk Mensejahterakan Lansia Melalui Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Tandem Hulu

Cindy Ayu Lestari<sup>1</sup> Jona Gunawan Gultom<sup>2</sup> Sella Ariska<sup>3</sup> Julia Ivanna<sup>4</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [Cindyayulestari43@gmail.com](mailto:Cindyayulestari43@gmail.com)<sup>1</sup> [jonagunawang@gmail.com](mailto:jonagunawang@gmail.com)<sup>2</sup> [sellaariska7@gmail.com](mailto:sellaariska7@gmail.com)<sup>3</sup> [juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa untuk mensejahterakan lansia melalui Program Bina Keluarga Lansia di desa tandem hulu, kecamatan Hamparan Perak, kabupaten Deli Serdang. Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif dimana dalam hal ini penelitian ini melakukan kajian ke lapangan yaitu ke Kantor Kepala Desa Tandem Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan pencarian sumber informasi lain seperti Buku, Jurnal, Dll. Sedangkan Metode penelitian yang Digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Tandem Hulu sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa yang ada. Karena para lanjut usia juga merupakan urusan dari Negara ataupun pihak pemerintah yang ada untuk bisa mensejahterakan para lansia yang ada. Dalam hal ini proses memberikan kesejahteraan para lansia selalu mengharapkan dari dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa, Sejahtera Lansia, BKL



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara yang menjamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Seluruh Warga Negara Indonesia. Salah satu Hak yang Pemenuhannya di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia adalah Hak Politik. Hak Politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk ikut serta dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". "setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bagaimana hak-hak warga negara menggunakan preferensi politik pada setiap momen pemilu. Dalampengertian luas, ketentuan pasal-pasal dimaksud mengatur kebebasan masyarakat menggunakan hak memilih dan dipilih secara demokratis. Hak dasar (basic right) bagi setiap individu sebagai warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Hak Politik sangat erat kaitannya dengan Pemerintah sebagai Penjamin Pemenuhan Hak Politik Tersebut. Hak Politik Dipenuhi karena setiap warga negara memiliki Hak atas Politik dan telah diatur oleh undang-undang. Hak politik itu juga menjadi salah satu jalur masyarakat

menyalurkan aspirasinya dan ikut terjun dalam pemerintahan. Selain itu, hak politik itu bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sampai melanggar hak-hak rakyat juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak Politik diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, mulai dari Remaja, Orang Dewasa, sampai Lanjut Usia (Lansia). Padahal, dalam ketentuan undang undang negara juga wajib memenuhi hak para lansia demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesiaa, terkhusus lansia. Pemenuhan hak Politik warga negara dapat di implementasikan melalui proses Pemilihan Umum yaitu penggunaan hak Pilih dan Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.

Namun, dalam Pengimplementasian nya, seringkali terjadi penyimpangan dari pemenuhaaaaaan hak politik tersebut. Tatkala, ada dari warga negara yang hak politik nya diabaikan. Lansia mejadi salah satu golongan yang hak politiknya sering terabaikan karena lansia memiliki Pemahaman ynag rendah tervhadap politik sehingga tidak paham apa yang menjadi hak nya dalam kehidupan bernegara ini. Padahal Kebijakan pemerintah seputar lanjut usia telah dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia No.13 tahun 1998. Di dalam Undang-undang itu disebutkan, yang termasuk kategori kelompok lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Dalam Undangundang yang sama, lanjut usia dibagi kedalam dua kelompok, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau Jasa. Sementara lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga diatur mengenai hak-hak lansia. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. Pelayanan kesehatan;
3. Pelayanan kesempatan kerja;
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. Perlindungan sosial;
8. Bantuan sosial.

Pelaksanaan hak politik yang tidak sesuai dengan jalur yang sesungguhnya. Yang dimana pihak-pihak yang egois atau pihakpihak yang hanya ingin mencapai keuntungan pribadi melakukan berbagai cara yang gelap untuk mencapai hasil yang memuaskan dirinya sendiri.cara gelap yang dimaksud adalah seperti memberikan sogokan atau uang suap suapaya tujuan untuk menjadi pemimpin dapat dicapainya dalam arti ia menggunakan materi. Hal ini merupakan suatu kendala untuk menerapkan hal politik warga negara dengan baik, dikarenakan pihak-pihak yang tertentu melakukan penyimpangan terhadap rakyat demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Peran Pemerintah dalam pemenuhan Hak Politik warga negara juga sangat besar karena Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian penerapan hak politik bagi warga negara, maka beberapa hal yang mesti dilakukan sebagai upaya menjunjung dan menghormati hak politik warga negara yaitu sebagai berikut:

1. Setiap warga negara harus mampu memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, baik dalam hal memilih dan dipilih, hak mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya.
2. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi.
3. Pemerintah harus mampu melindungi dan mengawasi hak politik sebagai warga negara.

4. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan.
5. Negara memberikan sarana hak politik. Sarana yang dimaksud adalah seperti pemilu atau pilkada, maka dengan demikian penerapan hak politik warga negara dapat dilaksanakan.
6. Semua aturan-aturan yang telah ditentukan dalam berpolitik harus dilakukan oleh semua warga negara. Dalam hal ini juga bagi siapa yang tidak melakukan aturan berpolitik mungkin saja akan diberikan sanksi terhadap orang tersebut.
7. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
8. Memberikan pemahaman kepada setiap warga negara bahwa hak politik sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu negara atau wilayah 5 tahun kedepan.
9. Pemerintah dalam hal ini melakukan perundingan akan penerapan hak politik warga negara tanpa adanya spekulasi memandang dari segi gender, strata sosial, serta peningkatan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan mengadakan sosialisasi dalam setiap daerah akan pentingnya hak politik tersebut diterapkan apalagi dengan kemajuan zaman atau globalisasi.
10. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah.
11. Diberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem pemerintahan.
12. Adanya penerapan sistem pemerintahan demokrasi.
13. Adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.

Dengan demikian upaya penerapan hak politik bagi warga negara selain pemerintah yang bertanggung jawab memberikan sarana dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara serta memberikan pengawasan berdasarkan modus-modus yang patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya serta menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa untuk mensejahterakan lansia melalui Program Bina Keluarga Lansia di desa tandem hulu, kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

### **Kajian Teori Pemerintah Desa**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah Desa diartikan sebagai sistem pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusannya masyarakatnya sendiri dan dan terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Permusyawaratan Desa. (Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa,2008). Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Menurut (Bambang Budiono, 2000) Pemerintah Desa Merupakan Penyokong dari Sistem Pemerintahan Daerah sehingga pada hakikatnya, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi daerah itu sendiri. Pada dasarnya keadaan dari Desa hamper sama dengan persoalan Negara, dimana di

dalam desa nantinya akan muncul masyarakat politik yang akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Negara. Didalam Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sementara Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang bertugas untuk membantu Kepala desa untuk melaksanakan Program yang telah dirancang sebelumnya. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas. (Siswanto, 2019)

### **Konsep Kesejahteraan**

Kesejahteraan warga negara merupakan urgensi atau tugas dari pemerintah sebagai impleentasi dari pemenuhan hak hak Warga Negara. Indikator kualitas hidup dalam kerangka OECD dibagi ke dalam 8 dimensi, namun penelitian ini hanya melihat 5 dimensi, yaitu:

1. Kualitas hidup, dalam indikator ini dimensi yang relevan dan akan dilihat dalam penelitian ini adalah:
  - a. Status Kesehatan, Kesehatan masyarakat merupakan aspek penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan bersosialisasi dengan orang lain. Parameter yang digunakan dalam survei ini adalah angka harapan hidup dan pertanyaan tentang keadaan kesehatan secara umum pada saat survei.
  - b. Pendidikan dan Keahlian, Pendidikan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan seseorang karena orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi mempunyai peluang yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang lebih tinggi. Survei ini akan melihat tingkat pendidikan lansia dalam rumah tangga. Selain itu, survei ini juga akan melihat pelatihan yang pernah diterima oleh lansia.
  - c. Koneksi Sosial Manusia, sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari sehingga frekuensi pertemuan dan kualitas pertemuan dengan orang lain menjadi faktor yang krusial dalam mendapatkan kesejahteraan. Berdasarkan data dari negara OECD, Lansia dilaporkan tidak memiliki kontak dengan orang lain, tiga kali lebih besar, dibandingkan dengan populasi lain pada umumnya. Parameter yang digunakan untuk mengukur koneksi sosial lansia adalah keaktifan lansia dalam kelompok komunitas dan seberapa sering lansia berinteraksi dengan orang lain.
  - d. Keterlibatan Publik, Partisipasi dalam politik merupakan kebebasan dan hak bagi setiap individu. Partisipasi dalam komunitas dapat membangun rasa memiliki dan kepercayaan antarsesama. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam politik dapat memengaruhi kebijakan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Survei akan melihat keterlibatan lansia dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta keterlibatan lansia dalam musrenbang yang diadakan di dusun/desa masing-masing.
  - e. Kesejahteraan Subjektif, Kepuasan akan kehidupan merefleksikan bagaimana individu menilai keadaan dirinya.
2. Kondisi Material, dalam indikator ini terdapat 3 dimensi, yaitu pendapatan dan kekayaan, pekerjaan dan penghasilan, dan kondisi rumah.
  - a. Pendapatan dan Kekayaan, Pengukuran kesejahteraan menggunakan pendapatan dan kekayaan dapat memperluas analisis dalam melihat kemiskinan secara multidimensi. Pendapatan dan kekayaan aset berpengaruh terhadap tingkat konsumsi individu maupun rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya, dalam kurun waktu tertentu. Pada konteks yang lebih luas, analisis terhadap pendapatan dalam rumah tangga akan berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesenjangan antar rumah tangga. Oleh karena itu, pendapatan dan kekayaan lansia menjadi salah satu dimensi yang dianalisis dalam penelitian ini. Pendapatan merujuk pada aliran sumber-

sumber ekonomi yang rumah tangga atau individu terima dalam kurun waktu tertentu—termasuk di dalamnya gaji, pendapatan yang bersumber dari kegiatan wirausaha, dan pendapatan dari sumber lain, seperti properti, dana pensiun, dan bantuan sosial (OECD, 2013). Pendapatan akan berkaitan dengan pekerjaan, distribusi pendapatan, dan kepemilikan aset sebagai akumulasi dari jumlah pendapatan dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, dengan menghubungkan aspek pendapatan dan kesenjangan antargender, pengukuran ini mampu melihat sejauh mana perbedaan gender berpengaruh terhadap pekerjaan, pendapatan yang diterima, dan kepemilikan aset bagi kelompok lansia. Dengan demikian, kesejahteraan lansia tidak hanya diukur dari aspek moneter, namun juga pada aspek pengurangan kesenjangan secara sosio-ekonomi.

- b. Pekerjaan dan Penghasilan, Secara umum, masyarakat menilai usia lansia melekat pada masa pensiun, yakni seseorang dinilai dapat berhenti bekerja dan menikmati hari tua. Namun demikian, belum ada Batasan yang jelas mengenai usia pensiun dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia. Selama ini usia pensiun dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 yang merupakan turunan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menetapkan usia pensiun pada 56 tahun.
- c. Kondisi rumah Rumah, adalah elemen utama dari standar kehidupan material masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang bukan hanya dapat memberikan tempat berlindung, tetapi juga untuk menawarkan rasa keamanan pribadi dan ruang pribadi. Kondisi rumah turut memengaruhi kondisi kesehatan secara fisik dan mental sehingga kondisi rumah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Parameter yang digunakan untuk melihat kondisi rumah, yaitu bahan atap, dinding, dan lantai rumah. Selain itu, menganalisis kondisi rumah tinggal lansia dapat memberikan informasi mengenai bagaimana lansia berinteraksi, siapa yang memberikan perawatan, bagaimana sumberdaya terbagi dalam rumah tangga, serta bagaimana hak atau preferensi lansia dipenuhi dalam lingkup keluarga.

### **Masyarakat Lanjut Usia**

Harlock (1980) mengatakan lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang, yang berarti suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari waktu yang lalu yang penuh dengan manfaat. Pada lanjut usia terjadinya proses menua. Menurut Constantanides (dalam Bandiyah 2009), menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Ini merupakan proses yang terusmenerus (berlanjut) secara alami. Ini dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua makhluk hidup. Menurut Depkes RI, Lansia adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindarkan. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologik yang terdiri dari tiga fase yaitu fase progresif, fase stabil dan fase regresif. Dalam fase regresif mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dimulai dalam sel, komponen terkecil dalam tubuh manusia. Begitu pula pada tahap perkembangan yang lain, maka pada lanjut usia terjadi perubahan fungsi fisik, emosi, kognitif, sosial, spiritual, dan ekonomi. Harlock (1980) membagi lanjut usia menjadi dua tahap, yaitu usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 sampai akhir kehidupan seseorang. Undang-undang no. 13/1998 tentang kesejahteraan usia lanjut. Usia lanjut adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sedangkan WHO menetapkan 65 tahun ke atas sebagai usia yang menunjukkan proses

menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. WHO membagi lanjut usia dalam 3 golongan, pertama usia 60-74 tahun sebagai usia lanjut awal, 75-90 tahun sebagai lanjut usia menengah dan 91 tahun ke atas usia lanjut akhir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif dimana dalam hal ini penelitian ini melakukan kajian ke lapangan yaitu ke Kantor Kepala Desa Tandem Hulu, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan pencarian sumber informasi lain seperti Buku, Jurnal, dll. Sedangkan Metode penelitian yang Digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan menghasilkan data deskriptif analitis yang menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Desa Tandem Hulu, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian yang Dilakukan subjek penelitiannya adalah kepala desa dan Perangkat Desa Tandem Hulu, Kec. Hampan Perak, Kab. Deli Serdang yang berjumlah 3 Subjek, dan kaum Lansia di desa Tandem Hulu, Kec. Hampan Perak, Kab. Deli Serdang yang berjumlah 10 Subjek. Dengan jumlah Total Subjek Penelitian ini berjumlah 13 Subjek yang terdiri dari Perangkat Desa dan Kaum Lansia di Desa Tandem Hulu, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Adapun Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dan Teknik analisis datanya menggunakan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Antar pribadi (Interpersonal Role)**

Dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa kepala desa (hukum tua) dalam proses meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia. Dalam hal ini juga kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia memberikan arahan pada perangkat desa untuk dapat membantu dalam proses penyaluran bantuan kepada para lansia, yang dimana bentuk tindakan dari kepala desa menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam proses mensejahterakan para lansia sudah baik karena para lansia juga merasakan bantuan tersebut. Dalam hal ini juga dapat membuktikan bahwa kepala desa yang ada, mampu menghubungkan organisasi perangkat desa untuk dapat melaksanakan program mereka dalam mensejahterakan para lansia yang ada. Kalau lansia di Desa Tandem Hulu itu untuk kesejahteraan, mereka mendapatkan bantuan dari dana desa dengan keluarga penerima manfaat. Pemerintah dalam membantu para lansia yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Pertama untuk penyaluran bantuan kepada lansia sejauh ini komunikasi baik dan tidak ada masalah yang serius dalam proses bantuan tersebut.

Strategi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yaitu memberikan bantuan langsung tunai pada lansia yang berhak mendapatkan bantuan ini dan juga dibidang kesehatan juga bisa dilihat dari pelayanan posyandu lansia. Untuk lansia yang mendapatkan bantuan, yaitu pada lansia yang sudah lanjut usia dan tidak ada perbedaan dari bidang ekonomi, artinya semuanya mendapatkan bantuan secara merata dan tidak ada pengelompokkan tertentu yang ada. Untuk mensejahterakan para lansia pihak pemerintah desa menggunakan

anggaran dari dana desa dan juga ada dana dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun itu hanya diberikan pada lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Contoh dari pemerintah desa dalam proses memberikan dalam memberikan bantuan dari program bantuan langsung tunai yang ada. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Tandem Hulu sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa yang ada. Karena para lanjut usia juga merupakan urusan dari Negara ataupun pihak pemerintah yang ada untuk bisa mensejahterakan para lansia yang ada. Dalam hal ini proses memberikan kesejahteraan para lansia selalu mengharapkan dari dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sejalan ini peran pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia dinilai sudah baik, karena lewat bantuan dari pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah desa dinilai sangat membantu para lansia, apalagi di tengah pandemic seperti ini tentunya para lansia membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako agar supaya para lansia tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka.

### **Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role)**

Peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan para lansia tentunya membutuhkan komunikasi yang baik, antara kepala desa, perangkat desa dan juga para lansia ini yang ada, karena proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tentunya membutuhkan komunikasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Contoh dari pemerintah desa dalam proses memberikan dalam memberikan bantuan dari program bantuan langsung tunai yang ada. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Tandem Hulu sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa yang ada. Karena para lanjut usia juga merupakan urusan dari Negara ataupun pihak pemerintah yang ada untuk bisa mensejahterakan para lansia yang ada. Dalam hal ini proses memberikan kesejahteraan para lansia selalu mengharapkan dari dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sejalan ini peran pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia dinilai sudah baik, karena lewat bantuan dari pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah desa dinilai sangat membantu para lansia, apalagi di tengah pandemic seperti ini tentunya para lansia membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako agar supaya para lansia tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka. Dalam hal ini juga dapat membuktikan bahwa kepala desa yang ada, mampu menghubungkan organisasi perangkat desa untuk dapat melaksanakan program mereka dalam mensejahterakan para lansia yang ada. Kalau lansia di desa Lowian itu untuk kesejahteraan, mereka mendapatkan bantuan dari dana desa dengan keluarga penerima manfaat. Pemerintah dalam membantu para lansia yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Pertama untuk penyaluran bantuan kepada lansia sejauh ini komunikasi baik dan tidak ada masalah yang serius dalam proses bantuan tersebut. Strategi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yaitu memberikan bantuan langsung tunai pada lansia yang berhak mendapatkan bantuan ini dan juga dibidang kesehatan juga bisa dilihat dari pelayanan posyandu lansia. Untuk lansia yang mendapatkan bantuan, yaitu pada lansia yang sudah lanjut usia dan tidak ada pembedaan dari bidang ekonomi, artinya semuanya mendapatkan bantuan secara merata dan tidak ada pengelompokkan tertentu yang ada. Untuk mensejahterakan para

lansia pihak pemerintah desa menggunakan anggaran dari dana desa dan juga ada dana dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun itu hanya diberikan pada lansia yang berusia 70 tahun ke atas.

### **Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role)**

Dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa pengambilan keputusan dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia sudah baik, dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka, karena keputusan dari pemerintah desa dalam mensejahterakan para lansia dalam hal ini memberikan bantuan kepada para lansia, sudah dirasakan oleh semua para lansia yang tentunya membutuhkan bantuan ini, yang dimana bantuan ini tentunya dapat membantu kelangsungan hidup para lansia yang ada, karena di tengah pandemi seperti ini, tentunya pemerintah desa juga harus ada perhatian khusus kepada para lansia yang ada, walaupun bantuan ini hanya dalam bentuk sembako atau kebutuhan pokok, namun tentunya sangat berharga bagi para lansia, apalagi para lansia yang ekonominya di bawah rata-rata. Dalam hal ini juga kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia memberikan arahan pada perangkat desa untuk dapat membantu dalam proses penyaluran bantuan kepada para lansia, yang dimana bentuk tindakan dari kepala desa menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam proses mensejahterakan para lansia sudah baik karena para lansia juga merasakan bantuan tersebut. Dalam hal ini juga dapat membuktikan bahwa kepala desa yang ada, mampu menghubungkan organisasi perangkat desa untuk dapat melaksanakan program mereka dalam mensejahterakan para lansia yang ada. Kalau lansia di desa Lowian itu untuk kesejahteraan, mereka mendapatkan bantuan dari dana desa dengan keluarga penerima manfaat.

Pemerintah dalam membantu para lansia yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai. Pertama untuk penyaluran bantuan kepada lansia sejauh ini komunikasi baik dan tidak ada masalah yang serius dalam proses bantuan tersebut. Strategi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yaitu memberikan bantuan langsung tunai pada lansia yang berhak mendapatkan bantuan ini dan juga dibidang kesehatan juga bisa dilihat dari pelayanan posyandu lansia. Untuk lansia yang mendapatkan bantuan, yaitu pada lansia yang sudah lanjut usia dan tidak ada perbedaan dari bidang ekonomi, artinya semuanya mendapatkan bantuan secara merata dan tidak ada pengelompokan tertentu yang ada. Untuk mensejahterakan para lansia pihak pemerintah desa menggunakan anggaran dari dana desa dan juga ada dana dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, namun itu hanya diberikan pada lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Contoh dari pemerintah desa dalam proses memberikan dalam memberikan bantuan dari program bantuan langsung tunai yang ada. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Tandem Hulu sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah desa yang ada. Karena para lanjut usia juga merupakan urusan dari Negara ataupun pihak pemerintah yang ada untuk bisa mensejahterakan para lansia yang ada. Dalam hal ini proses memberikan kesejahteraan para lansia selalu mengharapkan dari dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sejalan ini peran pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia dinilai sudah baik, karena lewat bantuan dari pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah desa dinilai sangat membantu para lansia, apalagi di tengah pandemic seperti ini tentunya para lansia membutuhkan bantuan dalam bentuk sembako agar supaya para lansia tetap bisa melangsungkan kehidupan mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa yakni kepala desa terkhususnya dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) melalui program BKL sudah terselenggara dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia. Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini. Pengambilan keputusan dari pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia sudah baik, dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka, karena keputusan dari pemerintah desa dalam mensejahterakan para lansia dalam hal ini memberikan bantuan kepada para lansia, sudah dirasakan oleh semua para lansia yang tentunya membutuhkan bantuan ini, yang dimana bantuan ini tentunya dapat membantu kelangsungan hidup para lansia yang ada, karena di tengah pandemi seperti ini, tentunya pemerintah desa juga harus ada perhatian khusus kepada para lansia yang ada, walaupun bantuan ini hanya dalam bentuk sembako atau kebutuhan pokok, namun tentunya sangat berharga bagi para lansia, apalagi para lansia yang ekonominya di bawah rata-rata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia, Renika Yogyakarta, 2000, Hlm. 32
- Kumara, I Gede Jaya And I Putu Nuratama. 2020. "Kebijakan Humanis Pemerintah Desa Dalung Terhadap Masyarakat Lanjut Usia", Vidya Wertta
- Maspaitella, M. J, Nancy Rahakbauwi. 2014. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial", Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 2, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia.
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Petring, Alexander. Dkk. 2009. "Buku Bacaan Sosial Demokrasi 3 Negara Kesejahteraan Dan Sosial Demokrasi", : Friedrich-Ebert-Stiftung Divisi Akademi Politik Bonn.
- Riyadi, Dkk. 2015. "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 (Welfare Indicators 2015)", Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). Jambi: Pusaka.
- Siswanto (2019) „Pemerintah Desa Kendalsari“, Repository Unisula, Pp. 248– 320. Available At: [Http://Repository.Unissula.Ac.Id](http://Repository.Unissula.Ac.Id).
- Sugiyono, 2013. "Memahami Penelitian Kualitatif" Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tim Redaksi Kbbi Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 1057
- Wilar, Meiita Marhani, Dkk. 2021. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Lowian, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan.", Jurnal Governance